



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN KETUA DPR-RI
PADA ACARA GERAKAN INDONESIA ANTIKORUPSI
"BERSAMA RAKYAT KITA PERANG TERHADAP KORUPSI"**

Di Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta 8 Desember 2010

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yang Terhormat;

- *Dewan Pembina Komite Pusat Gerakan Masyarakat Anti-Korupsi*
- *Dewan Pengurus Komite Pusat Gerakan Masyarakat Anti-Korupsi*
- *Hadirin yang berbahagia,*

Alhamdulillah, rasa syukur tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya jua, pada malam ini kita dapat hadir pada acara peluncuran buku, pin, dan stiker **Gerakan Indonesia Antikorupsi**.

Kita menyampaikan penghargaan kepada panitia atas terselenggaranya acara ini, diharapkan acara ini menghasilkan manfaat besar terutama dalam rangka upaya-upaya strategis yang

perlu terus menerus dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Hadirin yang berbahagia,

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera di dalam negara yang demokratis dan berkeadilan, diperlukan langkah-langkah dan prioritas utama dalam berbagai program. Salah satu aspek di dalam mewujudkan program yang bernilai strategis tersebut adalah **pemberantasan korupsi**. Pemberantasan korupsi memiliki prioritas yang tinggi dan menjadi komitmen seluruh komponen bangsa untuk mewujudkannya. Demikian pula, tata kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan mengedepankan akutabilitas dalam semua bidang, menjadi kunci bagi keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*), menjadi cita-cita dan harapan bagi kita semua.

Korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, karena korupsi berakibat secara signifikan terhadap segala aspek kehidupan, khususnya aspek sosial dan ekonomi. Salah satu dampak yang sangat memperhatikan adalah adanya kecenderungan pengusaha yang memutuskan untuk tidak menanamkan modalnya di Indonesia karena tingginya biaya transaksi yang berkaitan dengan proses di birokrasi. Hal ini berdampak pada laju perkembangan perekonomian Indonesia

yang berjalan lambat, berkurangnya lapangan kerja, dan mengakibatkan tingginya angka pengangguran.

Hadirin yang berbahagia,

Korupsi juga berimplikasi terhadap aspek sosial bahwa perilaku korupsi telah merasuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat membiarkan korupsi terjadi dan bahkan ikut dalam lingkaran korupsi.

Korupsi bukan lagi hal yang asing dalam kehidupan masyarakat, karena korupsi menyebar melalui jaringan yang tidak tampak sehingga sulit dijangkau oleh hukum.

Jaringan ini melemahkan penegakan hukum dan otoritas pemerintahan, mengurangi akuntabilitas pemerintah dan mengikis efektifitas institusi pemerintahan dalam pelayanan publik.

Keterlibatan aparaturnya pemerintah dalam kejahatan korupsi memiliki korelasi yang erat dengan pelanggaran hukum dari institusi yang seharusnya memberi perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut kemudian menyebabkan dampak sosial terbesar dari korupsi, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Hadirin yang berbahagia,

DPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan korupsi sesuai

kewenangannya, baik dalam fungsi pengawasan maupun terutama dalam fungsi perundang-undangan. Tahun 2010 ini DPR telah mengesahkan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi UU No. 8 tahun 2010, sebagai pengganti UU No 25 tahun 2003. UU ini penting sebagai langkah untuk dapat mempersulit pelaku korupsi dalam menghilangkan jejak hasil korupsi, karena korupsi merupakan salah satu tindak pidana awal dari tindak pidana pencucian uang.

Upaya lain yang dilakukan DPR adalah memasukkan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, RUU tentang KUHP dan RUU tentang KUHAP dalam Program Legislasi Nasional tahun 2010 dan dilanjutkan untuk prioritas tahun 2011. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia agar dapat dilaksanakan secara efektif.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam upaya pemberantasan korupsi harus terdapat integrasi antara pencegahan dan penindakan. Karena, upaya pemberantasan korupsi akan sia-sia apabila hanya dilakukan penindakan setelah korupsi terjadi. Upaya pencegahan terhadap korupsi harus dimulai dari dalam diri setiap warga negara

Indonesia. Karena itu, saya sangat mendukung Gerakan Indonesia Anti Korupsi, dan langkah-langkah lain yang senada.

Dengan adanya gerakan ini diharapkan akan terjadi perubahan perilaku masyarakat Indonesia, baik perilaku yang **membiarkan korupsi** terjadi tanpa melakukan tindakan apapun, maupun **menjadi bagian** dari jaringan korupsi itu sendiri. Gerakan ini juga diharapkan menjadi motor penggerak upaya pemberantasan korupsi, karena gerakan ini berasal dari rakyat dan melibatkan rakyat pada umumnya.

Hadirin yang berbahagia,

Saya menyambut baik peluncuran buku "Korupsi Kejahatan Kemanusiaan yang Luar Biasa". Semoga Gerakan Anti Korupsi menjadi tonggak peneguhan bersama dalam upaya memerangi korupsi. Demikian sambutan saya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 8 Desember 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie